

**MOTIVAS I ITALIC UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMPW) DALAM Mencari Dukungan ke MELANESIA SPEARED GROUP (MSG)**

**Oleh: Adityo Wirapranatha**  
(*naturonoid.AW@gmail.com*)

**Pembingbing : Irwan Iskandar, S.IP, MA**

*Bibliography: 7 Journals and/or Research Papers, 19 Books, 2 News Papers, 5 Articles, 4 Official Documents, 1 Essay, 76 Websites*

***Abstract***

*This Research is a diplomation political study which describes the ULMWP motivation looking for support to MSG. This Research will focus on why ULMWP looking for support to MSG. This Study interesting because describe about the motivation of ULMWP looking for support to MSG and ULMWP effort to get support from MSG to reach their goals that is self-determination for West Papua. This is qualitative research which used descriptive methods, and collecting datas from some resources like books, journals. official publication, and relevant websites. This paper used pluralism perspective, level analysis of group behavior, and separatists group concept from T. R. Gurr. The object in this research is ULMWP an main actor in International Relations. The result of this research shows that ULMWP looking for support to MSG to reach their goals from international community and get their independence from Indonesia. ULMWP has several motivations in seeking support for MSG. such as MSG as a media voices to struggle for the movement of ULMWP, conformity of the ULMWP and MSG in missiogs regarding human rights enforcement, ULMWP has race and historical proximity with MSG members, and good message from MSG Members to ULMWP regarding West Papua's self-determination. through this motivation, they tried to get support from the MSG in their goal of achieving independence from Indonesia.*

**Keywords : Motivation, Sepratists Movement, International Organization, Diplomation**

## A. Pendahuluan

Perkembangan gerakan separatis merupakan teka-teki baik untuk sejarah dan sosiologi. Mereka tidak berasal dari motif ekonomi atau dari akar murni linguistik (atau etnis). Pada titik ini lebih mudah untuk mengatakan apa yang bukan proto-nasionalisme.<sup>1</sup>

Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam bukunya *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik* bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan.<sup>2</sup>

Dari atas diketahui bahwa gerakan separatis menjadi suatu permasalahan kompleks dalam suatu Negara. Banyak cara yang dilakukan gerakan separatis dalam memerdekakan diri dari suatu Negara. Biasanya gerakan separatis melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata dan juga gerakan separatis juga mencari dukungan ke beberapa Negara atau organisasi internasional agar dapat mendesak Negara yang bersangkutan untuk melepaskan wilayah yang diperjuangkan oleh gerakan separatis. Banyak organisasi internasional yang bisa membantu

kaum geriliya atau gerakan separatis yang menempuh jalur diplomasi. Seperti, PBB dimana ada *Committee of 24 (Special Committee of Decolonization)* yang bertugas untuk mengafiliasi kaum geriliyawan atau gerakan separatis untuk mencapai kemerdekaan di wilayahnya. Hubungan dari organisasi internasional dan kaum geriliya atau gerakan separatis sangat erat hubungannya untuk mencapai kesepakatan dalam menekan suatu Negara dalam melepaskan wilayah Negara tersebut.

OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakan organisasi separatis yang berada di wilayah Papua dan penyebab terbentuknya OPM adalah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dimana pelaksanaan PEPERA terdapat kejanggalan pada saat pemungutan suara karena yang berpartisipasi bukan seluruh rakyat Papua melainkan Cuma 1025 pemimpin suku. Masalah lain di daerah ini adalah berkurangnya penduduk asli Papua sejak tahun 1970-an dan marginalisasi penduduk asli Papua dalam pembangunan sosio-ekonomi. Meskipun Papua Barat sangat kaya sumber daya alam, wilayah ini adalah provinsi termiskin di Indonesia. Masalah-masalah yang belum terpecahkan ini meningkatkan ketidakpercayaan antara pemerintah Indonesia dan orang Papua.<sup>3</sup>

Politik modern yang sebelumnya berkembang di dalam negeri dan seiring berjalannya waktu

---

<sup>1</sup> Bertrand M. Roehner dan Leonard J. Rahilly. *Separatism and Disintegration A Comparative Investigation*, LPTHE : Paris. 2016. Hal. 8.

<sup>2</sup> Dewi Fortuna Anwar dkk, *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. 2004. Hal. 213.

---

<sup>3</sup> Cahyo Pamungkas., "The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21, No. 2, 2017. Hal. 147-148.

pihak dari OPM melakukan berbagai jalur diplomasi dengan berbagai pihak seperti Negara dan Organisasi Internasional. Hingga terbentuknya ULMWP yang memfokuskan perjuangan Papua barat di dunia internasional.

Terbentuknya ULMWP yaitu pada pertemuan pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada 7 Desember 2014, berbagai faksi gerakan kemerdekaan bersatu untuk membentuk sebuah badan baru yang disebut *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Organisasi baru ini menyatukan tiga organisasi utama yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Dengan datang bersama-sama untuk menyajikan sebuah front bersatu, ini memungkinkan mereka untuk mengirimkan aplikasi segar untuk keanggotaan di *Melanesian Spearhead Group* (MSG).<sup>4</sup>

*Melanesian Spearhead Group* (MSG) muncul sebagai hasil dari pertemuan informal Kepala Pemerintahan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan perwakilan dari Front Pembebasan Sosialis Kanak Sosialis (FLNKS) yang diadakan di Goroka pada 17 Juli 1986. Para pemimpin sepakat pada pertemuan perdana mereka bahwa penting untuk memiliki posisi bersama dan solidaritas dalam memelopori isu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama, termasuk penyebab FLNKS

---

<sup>4</sup> United Liberation Movement for West Papua, "About ULMWP," <https://www.ulmwp.org/about-ulmwp> Diakses 25 september, 2018.

untuk kemerdekaan politik di Kaledonia Baru.

Melihat sebuah peluang yang besar dari MSG sebagai organisasi internasional regional, ULMWP mencoba untuk bergabung dengan MSG dan mencari dukungan ke Negara yang tergabung di dalam MSG. Negara yang tergabung di dalam MSG memiliki beberapa ketegangan antara negara bagian PNG dan Fiji yang lebih besar - yang semakin mendekat ke Jakarta, Vanuatu dan FLNKS, yang secara terbuka mengekspresikan solidaritas dengan gerakan nasionalis Papua Barat (dengan Kepulauan Solomon masih ragu).<sup>5</sup>

Dalam pengajuan pendaftaran keanggotaan ULMWP ke MSG, ULMWP diterima sebagai observer, dari hasil *20<sup>th</sup> MSG Leader Summit – Communique* 26 Juni 2015, tertera di bagian *Report of the Senior Official Meeting (SOM)* no. 8 butir xxv, tertulis bahwa, pada permohonan oleh ULMWP untuk keanggotaan, para pemimpin menyetujui bahwa ULMWP diakui sebagai anggota pengamat di bawah kategori regional dan internasional yang mewakili orang melanesia yang tinggal di luar negeri.<sup>6</sup>

Berdasarkan persoalan yang telah digambarkan diatas maka penulis dapat menyimpulkan suatu pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu

---

<sup>5</sup> Greg Fry dan Sandra Tarte, *The New Pacific Diplomacy*. ANU Press : Acton. 2015. Hal. 271-272.

<sup>6</sup> Melanesian Spearhead Group, *20<sup>th</sup> MSG Leaders' Summit "Let's build a strong Melanesia in the Pacific where peace, progress and prosperity is ensured and sustained for all"*. Melanesian Spearhead Group Secretariat : Honiara. 2015. Hal. 5.

## **Mengapa ULMWP mencari dukungan ke MSG ?**

### **B. Kerangka Pemikiran**

Menurut T. R. Gurr di sub bab *Minorities, Nationalist, and Islamists : Managing Communal Conflict in the Twenty-first Century* menjelaskan bahwa, Identitas dalam gerakan separatis sering didasarkan pada sejarah bersama, budaya, bahasa, dan kohesi sosial. Identitas menjadi lebih penting bagi anggota kelompok karena menderita ketidaksetaraan dan keluhan dari kelompok dominan dengan identitas berbeda. Pemimpin daerah kemudian bisa bingkai wacana politik dalam istilah separatis dan mempromosikan otonomi atau pemisahan diri sebagai solusi untuk keluhan kolektif. Berdasarkan identitas dan keluhan ini, gerakan separatis menggunakan teknologi komunikasi dan jaringan transnasional untuk mengorganisir aksi politik dan menarik dukungan dari kelompok-kelompok diaspora dan simpatisan asing.<sup>7</sup>

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa ULMWP itu secara rinci.
2. Untuk memahami motivasi ULMWP meminta bantuan ke MSG.
3. Untuk mengetahui dukungan yang diberikan oleh MSG ke ULMWP.

---

<sup>7</sup> Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson dan Pamela Aall, *Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World*. United States Institute of Peace : Washington DC. 2007. Hal. 136-138.

### **D. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan model eksplanatif. Peneliti melakukan penelitian dimulai dari premis-premis khusus yang nantinya akan menggambarkan fenomena yang terjadi secara keseluruhan. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana penulis menampilkan fakta-fakta mengenai motivasi ULMWP dalam mencari dukungan ke MSG.

### **E. Hasil Penelitian**

#### **1. Motivasi ULMWP Mencari Dukungan Ke MSG**

- a) MSG Sebagai Media Menyuarakan Perjuangan Pergerakan ULMWP ke Komunitas Internasional.

MSG adalah organisasi internasional regional yang mempunyai pengaruh besar di kawasan pasifik. Dibalik itu MSG selalu menyuarakan tentang isu-isu yang terjadi di kawasan pasifik, dari masalah ekonomi, politik, HAM dan keamanan. Yang paling menarik adalah isu tentang dekolonisasi yang dilakukan oleh MSG. di dalam MSG terdapat dua organisasi separatis yang meminta dukungan dari MSG yaitu FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste atau Kanak and Socialist National Liberation Front) yang berada di Kaledonia Baru dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang berada di Papua Barat.

Sebelum terbentuknya ULMWP, WPNCL (West Papua National Council for Liberation) sudah menjalin hubungan dengan MSG, di awal mereka menjalin hubungan, MSG mulai menyuarakan tentang isu-isu yang terjadi di Papua Barat. Setiap anggota-anggota yang tergabung di MSG giat menyuarakan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan ULMWP. Ada dua hal yang membuat MSG bisa menyuarakan perjuangan pergerakan ULMWP, yaitu pers masing-masing negara dan forum internasional.

Pers di setiap negara yang tergabung di MSG menyuarakan tentang perjuangan pergerakan ULMWP. Sebelum terbentuknya ULMWP, Papua Nugini sudah menyuarakan tentang isu-isu yang terjadi Papua Barat. Isu yang dibahas oleh media Papua Nugini adalah tentang isu pengungsi dari Papua Barat yang mengungsi ke Papua Nugini. Terbatas dari itu media yang ada di Papua Nugini tidak membahas tentang perjuangan kemerdekaan Papua Barat karena perjanjian bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini yang tidak akan membahas tentang permasalahan negara masing-masing. Media yang sering memberitakan tentang permasalahan di Papua Barat adalah *The Times PNG*, *Post-Courier* dan *The National*. Banyak temuan yang mereka dapatkan tentang fakta yang terjadi terkait masalah yang terjadi di Papua Nugini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Patrick Matbob dan Evangelia Papoutsaki, "West Papuan 'independence' and the Papua New Guinea press", Research Gate (September 2006), [https://www.researchgate.net/publication/235741590\\_West\\_Papua\\_%27independence%27\\_i](https://www.researchgate.net/publication/235741590_West_Papua_%27independence%27_i)

Berlanjut ke Vanuatu sebagai negara yang mendukung penuh atas perjuangan pergerakan kemerdekaan Papua Barat sering menyuarakan bagaimana usaha dari Papua Barat untuk meraih kemerdekaan. Media nasional Vanuatu yang sering memberitakan tentang Papua Barat adalah *Vanuatu Daily Post*.

Untuk Negara Fiji media yang memberitakan tentang Papua Barat adalah *Fiji Village*, media ini lebih memberitakan tentang apa yang terjadi Isu yang terkait dengan Papua Barat seperti berita yang diliput Pratika Mala di *Fiji Village* yang berjudul "*Pacific countries are small but collectively their votes matter on global resolutions - O'Neill*", Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill di *University of the South Pacific* selama kuliahnya tentang Regionalisme Pasifik. Ketika ditanya oleh seorang mahasiswa tentang termasuk Papua Barat dan APEC juga, O'Neill telah menjawab bahwa Papua Barat adalah tindakan atas kehendak sendiri dan Papua Barat termasuk anggota dari MSG yang sudah berpartisipasi di diskusi sub-regional.. Papua yang dikuasai Indonesia dan Papua Barat membentuk setengah dari bagian barat pulau Nugini dan perjuangannya untuk kemerdekaan sedang berlangsung.<sup>9</sup>

Dan yang terakhir adalah Negara Kepulauan Solomon yang

---

n\_the\_Papua\_New\_Guinea\_press Diakses 6 Maret 2019.

<sup>9</sup> Pratika Mala, "Pacific countries are small but collectively their votes matter on global resolutions - O'Neill," *fijivillage*, <http://fijivillage.com/news/Pacific-countries-are-small-but-collectively-their-votes-matter-on-global-resolutions---Oneill-r592sk/> Diakses 6 Maret 2019.

baru-baru ini mendukung penuh kemerdekaan Papua barat. media yang memberitakan tentang Papua Barat adalah *The Island Sun*. Berita yang menjelaskan tentang dukungan Negara Kepulauan Solomon terhadap Papua barat yang diliput oleh Barbanas Manebona di *The Island Sun* yang berjudul “*Rumbiak Lashes out at delegation to West Papua*”. Berita ini menjelaskan tentang kedatangan dari Juru Bicara ULMWP Jacob Rumbiak ke Kepulauan Solomon untuk meminta dukungan atas kemerdekaan Papua Barat. pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, bahwa SICA (*Solomon Island Christian Association*) membantu dalam kebijakan Pemerintah Kepulauan Solomon terhadap Papua Barat.<sup>10</sup>

MSG sebagai organisasi internasional regional mempunyai pengaruh di komunitas internasional. Sebagai salah satu organisasi yang mendukung kemerdekaan dari Papua Barat, MSG mempunyai tugas untuk menyuarkan pergerakan mereka di forum internasional, agar diakui oleh forum internasional dan diberi dukungan atas perjuangan mereka. Masing-masing negara anggota MSG memberikan dukungan di forum internasional seperti di sidang umum PBB dan sidang dewan HAM PBB.

b) Kesesuaian Misi ULMWP dan MSG Terkait Penegakan HAM.

---

<sup>10</sup> Barbanas Manebona, “Rumbiak Lashes out at delegation to West Papua,” *The Island Sun*, <http://theislandsun.com.sb/rumbiak-lashes-out-at-delegation-to-west-papua/> Diakses 6 Maret 2019.

ULMWP sebagai organisasi separatis politik mempunyai program tentang penegakan HAM. Dalam misi menyuarkan perjuangan mereka, ULMWP selalu mengangkat isu HAM yang terjadi Papua Barat. dalam melancarkan misi tersebut ULMWP meminta bantuan ke MSG untuk menyuarkan tentang isu pelanggaran HAM di Papua Barat. MSG mempunyai program yang sama tentang menyelesaikan masalah HAM yang terjadi di antara negara anggota MSG.

Dua Organisasi ini mempunyai kesesuaian misi terkait penegakan HAM, dimana MSG sebagai organisasi internasional regional sebagai fasilitator dan pendukung untuk menyuarkan masalah penegakan HAM di Papua Barat.

Misi dari Penegakan HAM ULMWP tertulis di *Westminster Declaration* yang di adakan di *House of Parliament*, London pada 3 Mei 2016. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Parlemen, Pengacara dan Akademisi, semuanya berdiskusi dan menegaskan tentang hak penentuan nasib sendiri di Papua barat.<sup>11</sup>

Misi dari penegakan HAM MSG tertulis di divisi program, bahwa peran Divisi Program adalah untuk memfasilitasi konsultasi, dialog dan pembangunan konsensus di antara anggota; mempromosikan prinsip-prinsip dasar demokrasi, dialog, pembangunan berkelanjutan dan hak

---

<sup>11</sup> PMC Editor, “Westminster meeting makes new declaration for West Papua’s future”, *Asia Pacific Report*, <https://asiapacificreport.nz/2016/05/04/westminster-meeting-makes-new-declaration-for-west-papuas-future/>, Diakses 7 Maret 2019.

asasi manusia yang diabadikan dalam Perjanjian Pembentukan MSG.<sup>12</sup>

- c) ULMWP Memiliki Kedekatan Secara Ras dan Historis Dengan Anggota-Anggota MSG.

Ras dari orang papua adalah bagian dari ras Melanesia dimana ras ini berdiam di kawasan pasifik. Dr. Yudi Latief menyatakan bahwa setiap warga masyarakat Bangsa Indonesia saat ini mewarisi minimal dua ras, Ras Papua Melanesia merupakan ras yang tertua di Indonesia. Nenek moyang dari Ras Papua Melanesia adalah nenek moyang pertama yang mendiami negeri ini.<sup>13</sup>

Penduduk di wilayah Melanesia memiliki ikatan budaya, meskipun terdapat beragam kelompok suku yang berbeda di seluruh geografi. Ini adalah hal umum untuk mendengar orang-orang di negara-negara lain, ketika menyebut orang Papua, mereka menyebut saudara dan saudari Melanesia mereka. Ini juga meluas ke Kaledonia Baru. Ada rasa yang kuat tentang hubungan antara beragam komunitas dan negara di

wilayah ini karena identitas Melanesia mereka yang sama.<sup>14</sup>

Masalah kemerdekaan politik dan kedaulatan adalah elemen sentral dalam pembentukan Forum Pasifik Selatan pada tahun 1971, ketika empat negara pulau independen pindah dari perbatasan Komisi Pasifik Selatan. Penentuan nasib sendiri banyak diperdebatkan di forum sepanjang tahun 1980-an.<sup>15</sup> Hingga terbentuknya MSG, dimana salah satu program MSG membantu untuk dekolonisasi anggota mereka yaitu Kaledonia Baru.

Hal ini dijadikan sebagai sebuah motivasi dari ULMWP untuk mencari dukungan MSG, dimana ULMWP mengklaim bahwa mereka dijajah oleh Indonesia, Benny Wenda Sebagai Ketua ULMWP pada saat Pertemuan Pemimpin MSG ke 21, dia menyatakan bahwa : “Para pemimpin Melanesia independen yang terhormat, orang-orang Papua Barat berhutang budi kepada Anda atas upaya serius Anda untuk mengakhiri konflik selama 55 tahun ini yang menyebabkan begitu banyak penderitaan dan trauma bagi rakyat kami. Sejak keputusan Anda di Noumea pada Juni 2013 untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut, kami membuat kemajuan besar dalam upaya kami. Kami menanggapi secara positif dorongan dari Perdana Menteri O’Neil untuk persatuan. Dengan bantuan rakyat dan Pemerintah Vanuatu para pemimpin kami mendirikan ULMWP

---

<sup>12</sup> Melanesian Spearhead Group Secretariat, “Programs Division,” Melanesian Spearhead Group, <http://www.msg.msgsec.info/index.php/msgsecretariat/programs-division> Diakses 7 Maret 2019.

<sup>13</sup> Fens Alwino, “Ras (Papua) Melanesia: Ras Tertua Di Nusantara”, Staging Point, <http://www.staging-point.com/read/2018/02/07/154108/Ras.Papua.Melanesia.Ras.Tertua.Di.Nusantara>, Diakses 9 Maret 2019.

---

<sup>14</sup> Jhonny Blades, “Melanesia’s test: The political quandary of West Papua”, *Pacific Journalism Review* Vol. 20, no. 2, 2014. Hal. 23-24.

<sup>15</sup> Greg Fry dan Sandra Tarte, op. cit. Hal. 264.

dan menandatangani Deklarasi Kesatuan Saralana. ULMWP adalah gerakan rakyat yang berbasis di Papua Barat. Tetapi untuk alasan keamanan, kantor pusat Internasionalnya berbasis di Port Vila, Republik Vanuatu. Pada bulan Desember tahun lalu kami telah meningkatkan ULMWP menjadi organisasi yang lengkap dengan seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Juru Bicara, dan Bendahara. Lengan Kehakiman dan Legislatif Gerakan ada di negara ini. Peningkatan ini diperlukan untuk mengantisipasi menjadi anggota MSG yang bertanggung jawab.”<sup>16</sup>

- d) Sambutan Baik Negara Anggota MSG Terhadap ULMWP Tentang Penentuan Nasib Sendiri Papua Barat.

Beberapa Anggota MSG mendukung penuh atas perjuangan kemerdekaan ULMWP, Vanuatu dan Kepulauan Solomon adalah negara pendukung ULMWP. Sebagai bentuk dukungan mereka kedua negara ini memberikan sambutan baik mereka terhadap perjuangan ULMWP.

Seperti pernyataan dari Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, “Vanuatu tidak menganggap gerakan Papua Barat atau ULMWP sebagai gerakan separatis atau berbeda, yang oleh orang Indonesia telah diberi label dan menganggapnya sebagai kasus

---

<sup>16</sup> United Liberation Movement for West Papua, “Speech by ULMWP Chairman Benny Wenda at the 21st MSG Leaders Summit”, <https://www.ulmwp.org/speech-ulmwp-chairman-benny-wenda-21st-msg-leaders-summit>, Diakses 12 Maret 2019.

wilayah, yang tidak pernah didekolonisasi dengan baik oleh PBB.”<sup>17</sup> Dan juga Sambutan Baik dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare mengatakan bahwa, “ULMWP dan orang-orang Papua Barat percaya bahwa waktunya sudah matang dengan kepemimpinan yang cakap dari Ketua untuk mendapatkan dukungan regional maksimum dalam perjuangan untuk pengakuan dan pemahaman di antara komunitas internasional.”<sup>18</sup>

Disatu sisi juga Papua Nugini tetap mengakui kedaulatan Indonesia terhadap wilayah Papua Barat. seperti yang dikatakan oleh Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, Rimbink Pato mengatakan bahwa Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia dan Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan mengganggu itu dan hukum internasional mengenai hal itu.<sup>19</sup> Sama seperti dengan Papua Nugini, Fiji memilih untuk tidak ikut

---

<sup>17</sup> Kizzy Kalsakau dan Jason Abel, “NO ‘MANIPULATIVE STEPS’”, Vanuatu Daily Post, [http://dailypost.vu/news/no-manipulative-steps/article\\_babfbfa5-c2ef-5350-b9be-f7667f787b37.html?fbclid=IwAR2WEkkyr\\_qQ78GzEWR2c3Hmr99x\\_ktLINuiXH00EbMhg\\_dd8q6R5oRGiLY](http://dailypost.vu/news/no-manipulative-steps/article_babfbfa5-c2ef-5350-b9be-f7667f787b37.html?fbclid=IwAR2WEkkyr_qQ78GzEWR2c3Hmr99x_ktLINuiXH00EbMhg_dd8q6R5oRGiLY), Diakses 12 Maret 2019.

<sup>18</sup> United Liberation Movement for West Papua, “Solomon Islands Prime Minister supports West Papua joining Pacific Islands Forum”, <https://www.ulmwp.org/solomon-islands-prime-minister-supports-west-papua-joining-pacific-islands-forum>, Diakses 12 Maret 2019.

<sup>19</sup> Serah Abraham, “West Papua Still An Intergral Part Of Indonesia”, Post-Courier, <https://postcourier.com.pg/west-papua-still-intergral-part-indonesia/>, Diakses 18 Maret 2019.

campur terhadap permasalahan yang terjadi di Papua Barat. Karena kerjasama bilateral antara Indonesia dan Fiji, Fiji mengakui kedaulatan Indonesia terhadap wilayah Papua Barat.<sup>20</sup>

## **2. ULMWP Mencari Dukungan ke MSG Terhadap Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat.**

- a) Menggiring Isu Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Papua Barat Ke MSG.

ULMWP dalam mencari dukungannya ke MSG mencoba untuk menggiring isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Dalam kesesuaian misi mereka dalam penegakan HAM. ULMWP mencoba untuk mempropaganda tentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat melalui website ULMWP agar anggota dari MSG dapat melihat bagaimana kondisi terkini dari Papua Barat. Dan dari beberapa isu yang terjadi beberapa petinggi dari ULMWP membuat statement terhadap kejadian terkait agar laporan tersebut tampak resmi dan disertakan dengan foto tentang kejadian tersebut. ULMWP juga meminta dukungan dan bantuan ke MSG agar permasalahan tersebut dapat disuarakan ke forum internasional melalui MSG atau dari ULMWP sendiri.

---

<sup>20</sup> Wim Geissler, "Isu Referendum Papua Picu Ketegangan Solomon Islands dan Fiji", Qureta, <https://www.quireta.com/post/isu-referendum-papua-picu-ketegangan-solomon-islands-dan-fiji>, Diakses 18 Maret 2019.

ULMWP memulainya dengan isu PEPERA dimana banyak terjadi kejanggalan dalam jajak pendapat tersebut. Sekretaris Jendral dari ULMWP, Octovianus Mote mengatakan, Bahkan sebelum Indonesia tiba, pada tahun 1961, Kongres Pertama Papua Barat menyatakan kebebasan kami, hak kami untuk bebas. Mereka mengibarkan bendera kemerdekaan Bintang Kejora dan menyanyikan lagu kebangsaan baru Papua Barat, "O, Papua negaraku. Kemudian lagi, pada tahun 1971, Organisasi Papua Merdeka menyatakan Papua Barat merdeka, jika tidak dalam kenyataannya, setidaknya dalam niat. Ketika Suharto jatuh dari kekuasaan pada tahun 1998, dan Papua Barat menikmati momen kebebasan pertama sejak Indonesia merampas hak lahir Papua Barat, Kongres Kedua Rakyat Papua, pada tahun 2000, sekali lagi menyatakan keinginan Papua Barat. Kongres kedua itu menyatakan penolakannya atas semua yang terjadi setelah Kongres pertama, termasuk Perjanjian *New York* 1962 antara Indonesia dan Belanda dan implementasinya selanjutnya dalam *Act of Free Choice of 1969* yang diberi nama memalukan.<sup>21</sup>

Setelah mengangkat isu dari PEPERA sebagai awal dari membawa isu HAM ke MSG, kemudian ULMWP mengangkat isu penangkapan aktivis kemerdekaan Papua Barat. ULMWP mengkalim

---

<sup>21</sup> United Liberation Movement for West papua, "ULMWP Secretary General Octo Mote's statement to MSG leaders", <https://www.ulmwp.org/pidato-penutupan-melanesian-spearhead-group>, Diakses 23 Maret 2019.

Kepolisian Republik Indonesia menangkap 8 Aktivist Politik atas nama Philipus Robaha, Marthen Manggarpro, Beny Hisage, Arnol Yarinap, Albert Yatipai, Gino Puade, Paul Kirihio dan Chris Dogopia. Penangkapan ini untuk mencegah pertemuan delegasi internasional untuk Koloni Indonesia Melanesia, dimana pada saat itu delegasi dari Kepulauan Solomon mengunjungi Jayapura dan Manokwari pada tanggal 24-25 april 2018.<sup>22</sup>

Penangkapan juga terjadi pada demonstrasi tanggal 3-8 september 2018, ULMWP mengklaim bahwa 104 orang ditangkap pada aksi tersebut. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk memanggil pemimpin negara-negara pasifik membawa isu penentuan nasib sendiri Papua Barat ke PBB. Demonstrasi damai lainnya diadakan di Papua Barat, termasuk di: Abepura, Bintuni, Keerom, Merauke, Pelabuhan Numbay (Jayapura), Sentani dan Sorong. Demonstrasi solidaritas damai lainnya juga diadakan di Ambon. Di Abepura 34 orang ditangkap karena melakukan demonstrasi secara damai, Di Bintuni 25 orang dan di Sentani 45 orang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> United Liberation Movement for West Papua, "ULMWP calls for immediate assistance to end Indonesia's 'Nazi-like' presence in West Papua.", <https://www.ulmwp.org/ulmwp-calls-for-immediate-assistance-to-end-indonesias-nazi-like-presence-in-west-papua>, Diakses 23 Maret 2019.

<sup>23</sup> United Liberation Movement for West Papua, "Mass arrests are bullying tactics – Indonesia's position over West Papua is fraudulent", <https://www.ulmwp.org/mass-arrests-are-bullying-tactics-indonesias-position-over-west-papua-is-fraudulent>, Diakses 23 Maret 2019.

Pada 14 oktober 2018 7 warga sipil terbunuh karena operasi militer yang dilakukan oleh pihak kementerian Indonesia. kejadian ini terjadi di daerah Puncak Jaya. Operasi ini dilakukan untuk memburu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang melarikan diri ke daerah tersebut. 5 warga sipil termasuk 2 anak-anak dan 2 personil TPNPB terbunuh dalam insiden tersebut. Statement yang dikeluarkan oleh Kolonel Muhammad Aidi selaku ketua dari operasi tersebut menyatakan bahwa pihak TNI menargetkan operasi ini ke daerah yang mengibarkan bendera bintang kejora, dan pada tempat kejadian perkara mereka menemukan beberapa senjata disana.<sup>24</sup>

Pada 1 desember 2018 terjadi penangkapan terhadap pendukung kemerdekaan Papua Barat. penangkapan ini terjadi karena aksi perayaan hari nasional Papua Barat yang terjadi di daerah Surabaya, Jakarta, Ambon, Ternate, Makassar, Manado, Kupang dan Yogyakarta. Kantor dari ULMWP juga didatangi oleh kepolisian di daerah Port Numbay (Jayapura), Asmat, Sorong, Merauke dan Timika. Total yang ditahan oleh penangkapan ini adalah 500 orang.

Kemudian krisis Nduga terjadi pada 2 Desember 2018. Kejadian ini berawal pada penembakan terhadap 28 pekerja PT Istaka karya oleh kelompok kriminal bersenjata. Pada saat itu para pekerja sedang mengerjakan

---

<sup>24</sup> RNZ, "Seven Papuans killed in Indonesian military operation", <https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/368041/seven-papuans-killed-in-indonesian-military-operation>, Diakses 24 Maret 2019.

pembangunan jembatan Yigi di kabupaten Nduga. Dilaporkan bahwa 19 pekerja meninggal di tempat dan 1 prajurit TNI gugur, banyak keraguan bahwa berapa jumlah korban sebenarnya karena medan yang sulit untuk memverifikasi jumlah sebenarnya.<sup>25</sup>

- b) Aksi Pendekatan Dan Mencari Dukungan Ke Negara Vanuatu Sebagai Negara Yang Tergabung Di MSG.

Vanuatu sebagai negara anggota MSG mendukung perjuangan Papua Barat berdasarkan prinsip inti Vanuatu tentang penentuan nasib sendiri dan gerkan non-blok. Sejak merdeka, Vanuatu sudah menegaskan untuk mendukung kemerdekaan dari Kaledonia Baru. Posisi Vanuatu dalam kaitannya dengan Papua Barat bukanlah sikap ad hoc atau sekedar sebuah reaksi. Vanuatu bukan negara yang mencari perhatian. Vanuatu memiliki rekam jejak yang terbukti dalam hubungan diplomatiknya dan berbicara dari pengalaman ketika menegaskan prinsip-prinsip dasar penentuan nasib sendiri. Pada 2010, menyusul petisi dari warga Vanuatu dan parlemen Vanuatu, dalam kata-kata Ron May, “mengesahkan mosi, dengan dukungan bipartisan menyerukan pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional tentang legalitas perjanjian 1962 antara Indonesia dan Belanda tentang status

---

<sup>25</sup> BBC Indonesia, “Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140>, Diakses 24 maret 2019.

Papua Barat dan legalitas *Act of Free Choice 1969*”.<sup>26</sup>

Vanuatu mendukung Papua Barat bukanlah hal baru, tetapi ketika berbicara mengenai MSG, ULMWP membutuhkan bantuan penuh dari Vanuatu agar ULMWP mendapat dukungan penuh dari MSG dan mendapatkan status keanggotaan pada organisasi internasional regional tersebut. Dalam hal ini ULMWP mencoba beberapa pendekatan dalam mendapatkan dukungan dari Vanuatu di MSG. ULMWP melakukan pendekatan seperti Ucapan Terima Kasih ULMWP Terhadap Bantuan Vanuatu yang di posting melalui website resmi ULMWP, kemudian melakukan perayaan hari kemerdekaan Vanuatu, penyerahan laporan tentang isu Papua Barat ke Vanuatu, dan Ucapan Belasungkawa Terhadap Presiden Vanuatu Baldwin Lonsdale.

- c) Pengajuan Pendaftaran Keanggotaan Penuh Ke MSG Oleh ULMWP

ULMWP dalam mencari dukungan ke komunitas internasional mencoba sebuah manuver untuk mendapat dukungan atas perjuangan mereka. sebelum terbentuknya ULMWP, WPNC (West Papua National Coalition for Liberation) sudah terlebih dahulu dalam melakukan pendaftaran keanggotaan di MSG. pada saat itu WPNC mengirim

---

<sup>26</sup> Patrick Kaiku, “Why Vanuatu supports West Papuan independence”, Keith Jackson & Friends: PNG ATTITUDE, [https://asopa.typepad.com/asopa\\_people/2019/02/why-vanuatu-supports-west-papuan-independence.html](https://asopa.typepad.com/asopa_people/2019/02/why-vanuatu-supports-west-papuan-independence.html), Diakses 26 Maret 2019.

5 delegasi untuk mendapatkan dukungan dari negara anggota MSG dalam pendaftaran keanggotaan mereka ke MSG, 5 delegasi tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden WPNCL John Otto Ondawame dan Sekretaris Jendral Rex Rumakiek.<sup>27</sup>

Dukungan Vanuatu terhadap Papua Barat terus berlanjut, Gereja Vanuatu dan Kepala Adat menjadi tuan rumah dalam pertemuan aktivis kemerdekaan Papua Barat pada Desember 2014. Dalam gabungan 3 faksi Organisasi Papua Merdeka yaitu NRFPB, WPNCL dan PNWP akhirnya terbentuklah satu organisasi separatis politik ULMWP yang berfokus pada pencarian dukungan komunitas internasional atas perjuangan pergerakan kemerdekaan Papua Barat.<sup>28</sup>

Hasil dari pendaftaran keanggotaan mereka ke MSG mendapatkan respon dari pihak MSG, ULMWP mendapatkan status observer pada *20th MSG Leader Summit – Communique* 26 Juni 2015. Pada saat yang sama Indonesia mendapatkan status anggota asosiasi di MSG.<sup>29</sup>

Menyusul pendaftaran penuh keanggotaan MSG, ULMWP mendapatkan panggilan dari Port Moresby untuk memenuhi persyaratan keanggotaan penuh MSG. Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil dan Pemerintahan Papua Nugini mengundang ULMWP untuk menghadiri *the 21<sup>st</sup> Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders’*

*Summit* pada 14 Februari 2018. Juru Bicara ULMWP Jacob Rumbiak mengatakan bahwa dia berharap alikasi pendaftaran keanggotaan penuh MSG dapat terealisasi pada pertemuan tersebut, dia juga menambahkan bahwa ini adalah aspirasi dari semua rakyat Papua Barat untuk bergabung dalam organisasi saudara dan saudari Melanesia.<sup>30</sup>

Alhasil dari pemenuhan persyaratan tersebut, pendaftaran keanggotaan penuh ULMWP diterima oleh MSG dan diserahkan ke sekretariat untuk diproses dibawah pedoman yang baru disetujui. Hal ini tertulis dalam hasil pertemuan tersebut pada bagian *Update on Membership Guidelines* No.13 butir ii.<sup>31</sup>

#### d) Respon MSG Terhadap Pencarian Dukungan ULMWP.

Sejak ULMWP mendaftarkan diri menjadi anggota penuh MSG, sudah banyak cara yang ULMWP gunakan untuk mendapatkan dukungan dari MSG. dimulai dari diangkatnya ULMWP menjadi observer dan status keanggotaan penuhnya masih di proses, ada berbagai respon yang diberikan MSG kepada ULMWP.

---

<sup>30</sup> United Liberation Movement for West Papua, “United Liberation Movement for West Papua in Port Moresby fulfills prerequisites for MSG membership”, <https://www.ulmwp.org/united-liberation-movement-west-papua-port-moresby-fulfills-prerequisites-msg-membership>, Diakses 27 Maret 2019.

<sup>31</sup> Melanesian Spearhead Group, *21<sup>st</sup> MSG Leaders’ Summit Strengthening Trade and Sustainable Development for an Inclusive Melanesia*, (Port Moresby: Melanesian Spearhead Group Secretariat, 2018), Hal. 3.

---

<sup>27</sup> Greg Fry dan Sandra Tarte, op. cit. Hal. 274-275.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Melanesian Spearhead Group, Loc. Cit.

MSG memperbolehkan ULMWP untuk membuka kantor pusat mereka di Port Vila, Vanuatu. Sebidang tanah diberikan oleh pemerintah Vanuatu kepada ULMWP untuk membangun kantor pusat ULMWP untuk memperlancar proses misi dari ULMWP dalam mendekati diri dengan MSG. Alamat dari kantor ULMWP terletak di *Winston Churchill Street*, 1571 Port Vila, Vanuatu.<sup>32</sup>

Kemudian masing-masing negara anggota MSG juga memberikan respon terhadap ULMWP. Seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon yang selalu menyuarakan isu di Papua Barat di Sidang Umum PBB dan di Dewan HAM PBB. Vanuatu juga membantu Benny Wenda selaku Ketua ULMWP untuk bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM untuk PBB, Michelle Bachelet di Genewa Tanggal 25 Januari 2019. Pihak Vanuatu memfasilitasi ULMWP dalam pemberian petisi yang diklaim oleh ULMWP sebagai petisi yang ditandatangani oleh 1,8 Juta Masyarakat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia.<sup>33</sup>

## F. Kesimpulan

ULMWP mendapatkan kesulitan dalam mencari dukungan dari komunitas internasional

khususnya MSG, dimana dua negara MSG Fiji dan Papua Nugini masih memilih untuk tetap tidak mendukung ULMWP secara terang-terangan. Hal ini terbukti dengan jelas dengan pendaftaran keanggotaan penuh MSG masih belum jelas sampai sekarang. Vanuatu dan Kepulauan Solomon yang mendukung ULMWP tidak bisa berbuat banyak terhadap ULMWP, bantuan yang dilakukan seperti menyuarakan isu Papua Barat di komunitas internasional dan memfasilitasi pertemuan dengan PBB. ULMWP juga banyak mempunyai kesalahan dalam membuktikan bukti otentik tentang masalah HAM di Papua Barat yang membuat banyak orang masih ragu dengan isu yang terjadi di sana.

## Daftar Pustaka

### Jurnal :

Cahyo Pamungkas. The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 21. no. 2. 2017.

Jhonny Blades. Melanesia's test: The political quandary of West Papua. *Pacific Journalism Review*. Vol 20. no. 2. 2014.

### Buku :

Bertrand M. Roehner dan Leonard J. Rahilly, *Separatism and Disintegration A Comparative Investigation*. LPTHE : Paris. 2016.

Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson dan Pamela Aall, *Leashing the Dogs of War: Conflict*

---

<sup>32</sup> United Liberation Movement For West Papua, <https://www.ulmwp.org/contact> Diakses 14 Mei 2019.

<sup>33</sup> United Liberation Movement For West Papua, <https://www.ulmwp.org/chairman-of-the-ulmwp-celebrates-handing-in-of-west-papuan-peoples-petition-to-un-high-commissioner> Diakses 14 Mei 2019.

Management in a Divided World. United States Institute of Peace : Washington D.C 2007.

Dewi Fortuna Anwar dkk. Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. 2004.

Greg Fry dan Sandra Tarte. The New Pacific Diplomacy. ANU Press : Acton. 2015.

### **Dokumen Resmi :**

Melanesian Spearhead Group. 20th MSG Leaders' Summit "Let's build a strong Melanesia in the Pacific where peace, progress and prosperity is ensured and sustained for all. Melanesian Spearhead Group Secretariat : Honiara. 2015.

Melanesian Spearhead Group. *21st MSG Leaders' Summit Strengthening Trade and Sustainable Development for an Inclusive Melanesia.* Melanesian Spearhead Group Secretariat : Port Moresby. 2018.

### **Artikel :**

Matbob, Patrick dan Evangelia Papoutsaki. 2017. West Papuan 'independence' and the Papua New Guinea press.

### **Website :**

Barbanas Manebona. "Rumbiak Lashes out at delegation to West Papua." The Island Sun, [\[lashes-out-at-delegation-to-west-papua/\]\(http://theislandsun.com.sb/rumbiak-lashes-out-at-delegation-to-west-papua/\).](http://theislandsun.com.sb/rumbiak-</a></p></div><div data-bbox=)

BBC Indonesia, "Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140>

Fens Alwino, "Ras (Papua) Melanesia: Ras Tertua Di Nusantara", Staging Point, <http://www.staging-point.com/read/2018/02/07/154108/Ras.Papua.Melanesia.Ras.Tertua.Di.Nusantara>

Kizzy Kalsakau dan Jason Abel, "NO 'MANIPULATIVE STEPS'", Vanuatu Daily Post, [http://dailypost.vu/news/no-manipulative-steps/article\\_babfbfa5-c2ef-5350-b9be-f7667f787b37.html?fbclid=IwAR2WEkkyr\\_qQ78GzEWR2c3Hmr99x\\_ktLINuiXH00EbMHg\\_dd8q6R5oRGIIY](http://dailypost.vu/news/no-manipulative-steps/article_babfbfa5-c2ef-5350-b9be-f7667f787b37.html?fbclid=IwAR2WEkkyr_qQ78GzEWR2c3Hmr99x_ktLINuiXH00EbMHg_dd8q6R5oRGIIY)

Melanesian Spearhead Group Secretariat, "Programs Division," Melanesian Spearhead Group, <http://www.msg.msgsec.info/index.php/msgsecretariat/programs-division>

Patrick Kaiku, "Why Vanuatu supports West Papuan independence", Keith Jackson & Friends: PNG ATTITUDE, [https://asopa.typepad.com/asopa\\_people/2019/02/why-vanuatu-supports-west-papuan-independence.html](https://asopa.typepad.com/asopa_people/2019/02/why-vanuatu-supports-west-papuan-independence.html)

PMC Editor. "Westminster meeting makes new declaration for West Papua's future." Asia Pacific Report, <https://asiapacificreport.nz/2016/05/04/westminster-meeting-makes-new-declaration-for-west-papuas-future/>.

Pratika Mala. “Pacific countries are small but collectively their votes matter on global resolutions - O’neill,” fijivillage, <http://fijivillage.com/news/Pacific-countries-are-small-but-collectively-their-votes-matter-on-global-resolutions---Oneill-r592sk/>.

RNZ, “Seven Papuans killed in Indonesian military operation”, <https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/368041/seven-papuans-killed-in-indonesian-military-operation>

Serah Abraham, “West Papua Still An Intergral Part Of Indonesia”, Post-Courier, <https://postcourier.com.pg/west-papua-still-intergral-part-indonesia/>

United Liberation Movement for West Papua. “About ULMWP.” <https://www.ulmwp.org/about-ulmwp>.

United Liberation Movement For West Papua, <https://www.ulmwp.org/chairman-of-the-ulmwp-celebrates-handing-in-of-west-papuan-peoples-petition-to-un-high-commissioner>

United Liberation Movement For West Papua, <https://www.ulmwp.org/contact>

United Liberation Movement for West Papua, “Mass arrests are bullying tactics – Indonesia’s position over West Papua is fraudulent”, <https://www.ulmwp.org/mass-arrests-are-bullying-tactics-indonesias-position-over-west-papua-is-fraudulent>

United Liberation Movement for West Papua, “Speech by ULMWP Chairman

Benny Wenda at the 21st MSG Leaders Summit”, <https://www.ulmwp.org/speech-ulmwp-chairman-benny-wenda-21st-msg-leaders-summit>

United Liberation Movement for West Papua, “Solomon Islands Prime Minister supports West Papua joining Pacific Islands Forum”, <https://www.ulmwp.org/solomon-islands-prime-minister-supports-west-papua-joining-pacific-islands-forum>

United Liberation Movement for West Papua, “ULMWP calls for immediate assistance to end Indonesia’s ‘Nazi-like’ presence in West Papua.”, <https://www.ulmwp.org/ulmwp-calls-for-immediate-assistance-to-end-indonesias-nazi-like-presence-in-west-papua>

United Liberation Movement for West Papua, “ULMWP Secretary General Octo Mote’s statement to MSG leaders”, <https://www.ulmwp.org/pidato-penutupan-melanesian-spearhead-group>

United Liberation Movement for West Papua, “United Liberation Movement for West Papua in Port Moresby fulfills prerequisites for MSG membership”, <https://www.ulmwp.org/united-liberation-movement-west-papua-port-moresby-fulfills-prerequisites-msg-membership>

Wim Geissler, “Isu Referendum Papua Picu Ketegangan Solomon Islands dan Fiji”, Qureta, <https://www.quireta.com/post/isu->